



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER SUBANG

Jl. Terusan Garuda Blok Werasari RT. 33/11 Dangdeur, Subang – Jawa Barat
Telp. 0260-7423134, Fax. 0260-7423178
Website. <https://bvetsubang.ditjenpkh.pertanian.go.id>
Email. bvetsubang@pertanian.go.id, bvet.subang@gmail.com

Nomor : 0401.1/RC.320/F.4.J/06/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Laporan PPID Bulan Mei 2026 Balai Veteriner Subang

04 Juni 2026

Yth. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian
Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan, Jakarta Selatan 12550

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan 1 (Satu) berkas Laporan Bulanan PPID Bulan Mei Tahun 2026 sebagaimana terlampir.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Veteriner Subang



drh. Putut Eko Wibowo
NIP 197408062001121001



LP-1434-IDN
SNI ISO/IEC 17025:2017
PUP-051-IDN
SNI ISO/IEC 17043:2023

Q-6891/25
ISO 9001 : 2015

G-05-ID0117-XII-2018
SNI 37001 : 2016
G-06-ID0117-II-2023
SNI ISO 45001 : 2018



Balai Veteriner Subang

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian

MEI 2026

LAPORAN BULANAN PPID



BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Indonesia memasuki era baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terbuka, transparan, dan akuntabel. Undang-undang ini menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik serta mewajibkan setiap badan publik menyediakan dan membuka akses informasi, kecuali terhadap informasi tertentu yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterbukaan informasi publik memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem demokrasi, karena memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kebijakan dan langkah yang diambil oleh badan publik, khususnya pemerintah. Penyelenggaraan kekuasaan negara dalam sistem demokrasi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara maupun kepentingan publik lainnya. Badan publik mencakup lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, serta badan lain yang sebagian atau seluruh pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Daerah, termasuk organisasi nonpemerintah yang menerima pendanaan dari sumber tersebut.

Balai Veteriner Subang (BV Subang) sebagai badan publik yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, memiliki peran penting dalam penyediaan informasi publik di bidang penjaminan keamanan dan mutu produk hewan. Melalui pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, surveilans, serta sertifikasi berbasis laboratorium, BV Subang berkontribusi dalam menjaga kesehatan

hewan dan keamanan pangan asal hewan. Dengan wilayah kerja meliputi Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, BV Subang dituntut untuk menyelenggarakan layanan informasi publik yang transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Tujuan

Adapun tujuan penyusunan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Balai Veteriner Subang adalah sebagai berikut:

1. Menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan terkait kegiatan pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi keamanan serta mutu produk hewan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peran dan fungsi Balai Veteriner Subang dalam menjamin kesehatan hewan dan keamanan pangan asal hewan.
4. Mendukung partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi badan publik, khususnya di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
5. Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penyediaan informasi publik yang mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BULAN MEI 2026

Antara lain berisi tentang ringkasan kegiatan terkait keterbukaan informasi publik, permohonan dan pelayanan informasi publik di Balai Veteriner Subang yang disampaikan secara langsung saat kunjungan, melalui WA atau email.

Tata Cara Permohonan Informasi

Permohonan informasi dapat dilakukan secara langsung maupun secara *online* melalui portal PPID Balai Veteriner Subang di <https://ppid.pertanian.go.id/index.php/portal>. Waktu layanan PPID di Balai Veteriner Subang:

- ✓ Senin – Kamis Pukul 07.30 – 15.00 WIB (Istirahat Pukul 12.00 – 13.00 WIB)
- ✓ Jumat 07.30 – 15.00 WIB (Istirahat Pukul 11.00 – 13.00 WIB)

Pemohon informasi beragam, ada yang datang langsung dan ada yang melalui WA Pelayanan kami di 0260-7423134.

Sesuai SK Balai No. 1023/Kpts/HK.160/F.4.J/02/2026 tertanggal 10 Februari 2026 menerangkan bahwa tim PPID Balai Veteriner Subang terdiri dari:

1. drh. Putut Eko Wibowo: PPID Pelaksana dan Penanggung Jawab
2. drh. Aprizal Panus, M.Si: Koordinator PPID
3. drh. Yuliyanti, M.Sc: Anggota
4. drh. Puttik Allamanda, M. Epid: Anggota
5. drh. Rahma Hani Aisah, M.Sc: Anggota
6. drh. Rifaati Hanifa: Anggota
7. drh. Anisa Widiastuti: Anggota
8. Afif Ibrahim, A.Md: Anggota
9. Eka Mahpudin, SST: Anggota
10. Ardiyanto Y Prastyawan, A.Md. Kom: Anggota
11. Anggi P Larasati, A.Md. Vet: Anggota
12. Fuji Nurfauijah P, A.Md. Vet: Anggota

13. Dava M Darmawan, A.Md. Vet: Anggota
14. Meiland Trie Andriani: Anggota
15. drh. Firstina Claudia Santi : Anggota

PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK BALAI VETERINER SUBANG

LANGKAH 1

Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik langsung secara lisan, melalui surat atau surat elektronik (email), dan juga permintaan dapat dilakukan melalui telepon.

LANGKAH 2

Pemohon informasi harus menuliskan jenis informasi yang diinginkan pada form yang tersedia yaitu Form 1A untuk perorangan atau Form 1B untuk badan hukum/badan publik/kelompok.

LANGKAH 3

Pengelola PPID mencatat semua informasi yang di sebutkan oleh pemohon

LANGKAH 4

Pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran

LANGKAH 5

Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja Pejabat PPID harus memberikan jawaban tertulis atas permintaan informasi yang di butuhkan. PPID dapat meminta perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk memenuhi permintaan informasi disertai alasan perpanjangan.

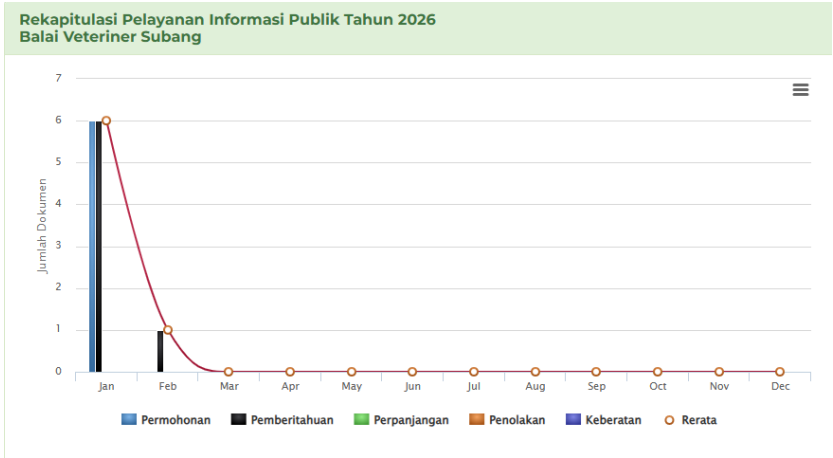
LANGKAH 6

Setelah waktu yang ditentukan pemohon menerima informasi.

LANGKAH 7

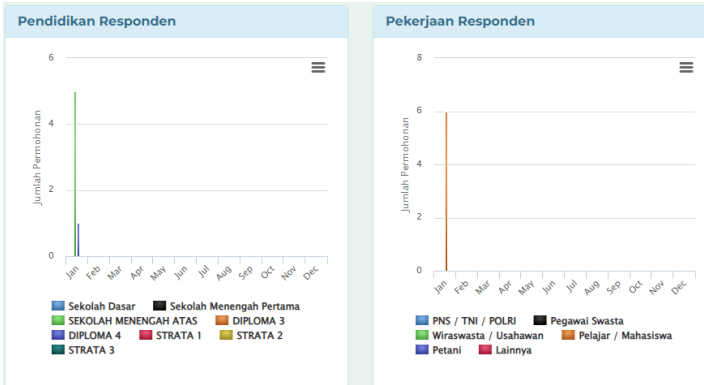
Jika pemohon merasa tidak puas dengan informasi yang diberikan maka dapat mengajukan keberatan informasi.

BAB III. TABEL REKAPITULASI PERMOHONAN DAN PENGELOLAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI BULAN MEI 2026

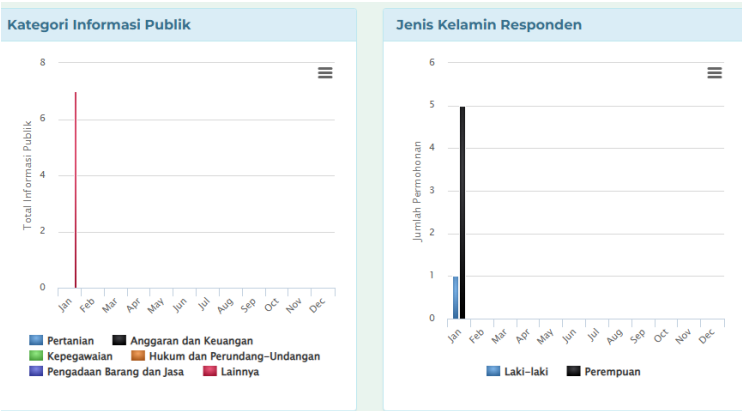


Gambar 1. Grafik Pelayanan Informasi Publik Mei 2026

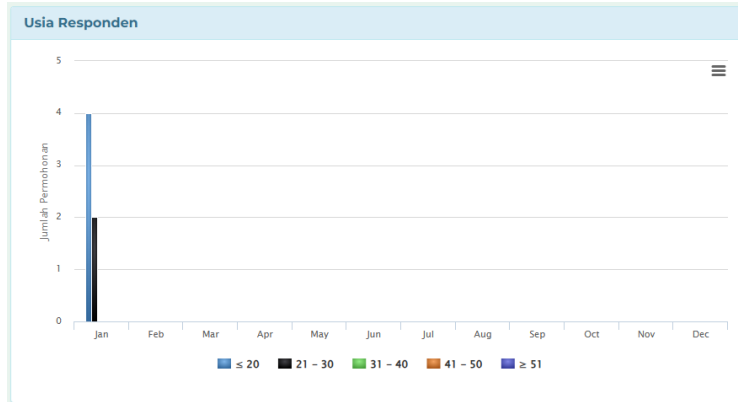
Di bulan Mei 2026, terlihat tidak adanya pemberitahuan dan tidak ada permohonan terkait dengan dokumen permintaan informasi.



Gambar 2. Grafik Pendidikan dan Pekerjaan Responden



Gambar 3. Grafik Kategori dan Jenis Kelamin Responden



Gambar 4. Grafik usia responden

Responden yang meminta data di Mei 2026 ini tidak ada sehingga untuk data pendidikan, pekerjaan, usia, jenis kelamin responden, dan kategori informasi publik tidak ada.

6	7	0	0	0
Pemohonan	Pemberitahuan	Perpanjangan	Penolakan	Keberatan

Pelayanan Informasi Publik		
Rata rata pelayanan 1 hari, 3 jam, 36 menit, 30 detik	Pelayanan Tercepat 5 jam, 13 menit, 1 detik	Pelayanan Terlama 3 hari, 2 jam, 24 menit, 30 detik

Gambar 5. Informasi Rata-rata Waktu Pelayanan dalam Pelayanan Informasi Publik dan Pelayanan Keberatan

Dari informasi yang diperoleh, terlihat bahwa rata-rata pelayanan sampai bulan Mei 2026 adalah 1 hari 3 jam 36 menit 30 detik. Tercatat juga pelayanan tercepat 5 jam 13 menit 1 detik dan pelayanan yang cukup lama yaitu 3 hari 2 jam 24 menit 30 detik. Untuk pelayanan keberatan, tidak ada permohonan untuk hal tersebut di bulan Mei 2026.

KESIMPULAN:

Pada Mei 2026 tidak terdapat pemberitahuan informasi dari BV Subang dan tidak ada permohonan data ke BV Subang.

CATATAN :

1. Tabel Rekapitulasi Permohonan dan Pemberitahuan Informasi Publik dapat diunduh dari Rekapitulasi Permohonan pada Portal PPID.
2. Permohonan melalui kunjungan (*Offline*), e-mail maupun surat yang telah lengkap persyaratannya sesuai peraturan yang berlaku di *entry* oleh petugas PPID, sehingga nanti akan terekap di Rekapitulasi pada Portal PPID.

Subang, 3 Mei 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Veteriner Subang



drh. Putut Eko Wibowo
NIP 197408062001121001